

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia menuntut adanya aturan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) mendaki tersedianya pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik oleh auditor atas pelaksanaan pemerintah. Pengelolaan keuangan pemerintah yang jelas tentunya harus didukung oleh kualitas audit yang baik pula. Kualitas kinerja suatu lembaga negara merupakan kebutuhan publik selain profesionalisme dan independensi dalam melaksanakan tugasnya, kinerja seorang auditor dinilai sangat penting. Audit merupakan suatu proses kegiatan pemeriksaan untuk memperoleh penilaian dan pendapat. Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak ketiga (Bayangkara, 2015). Oleh karena itu, lembaga negara harus memiliki tenaga kerja yang berkualitas.

Pengawasan memiliki peran krusial, terutama dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). *Good Corporate Governance* (GCG) didasarkan pada sepuluh prinsip utama, yaitu akuntabilitas, pengawasan, responsivitas, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, visi ke depan, partisipasi, serta penegakan hukum. (Anggraini & Syofyan, 2020). Mardiasmo (2010) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Sehingga peran BPKP sangat penting dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi (Anggraini & Syofyan, 2020).

Tugas Perwakilan BPKP sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu melaksanakan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas *sectoral*, melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara, melaksanakan kegiatan berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya, pelaksanaan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPKP juga menjalankan tiga belas fungsi beberapa di antaranya, yaitu 1) melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas permintaan dari pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diperoleh pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan pemegang kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) melakukan audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap terjadinya hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi

pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (<https://www.bpkp.go.id/jambi/2024>).

Fenomena yang terjadi pada BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menunjukkan berbagai isu terkait kinerja auditor dan implementasi kebijakan pengawasan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Jambi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, beberapa permasalahan utama mencakup integritas, independensi, dan kapabilitas auditor dalam melaksanakan tugasnya. Auditor di BPKP Jambi sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan independensi mereka. Rapat koordinasi yang diadakan pada tahun 2022 menekankan pentingnya integritas dan independensi auditor untuk memastikan pemerintahan yang jujur, bersih, akuntabel, dan transparan hingga tingkat desa. Pencapaian level 3 kapabilitas SDM atas APIP belum optimal dalam bidang pengelolaan risiko dan memiliki kemampuan melaksanakan audit kinerja menjadi tonggak awal dalam meningkatkan peran layanan sehingga APIP tidak hanya melakukan pengawasan dan sebagai auditor tapi juga dapat melakukan jasa konsultasi dan audit kinerja terhadap kelancaran penyelenggaraan program pemerintah daerah (*LKj-IP BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, 2022*).

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah pelaksanaan pembinaan, pembekalan, dan pelatihan secara berkala dianggap efektif dan efisien dalam meningkatkan kompetensi auditor. Tindakan meningkatkan kompetensi melalui aktivitas yang dapat memotivasi, penerapan independensi dan profesional diharapkan dapat membantu auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, auditor BPKP juga terlibat dalam program-program strategis, seperti penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di provinsi. Hal ini menandakan bahwa auditor tidak hanya ada dalam pengawasan keuangan, tetapi juga dalam program-program pembangunan sosial. Secara keseluruhan, BPKP Perwakilan Provinsi Jambi terus berusaha untuk meningkatkan kinerja auditornya melalui berbagai inisiatif dan program pelatihan, meskipun tantangan terkait integritas dan independensi tetap menjadi fokus utama untuk memastikan kualitas pengawasan yang optimal (*jamberita.com, 2024*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, audit sektor pemerintahan mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan khusus. Audit sektor pemerintah salah satu tipenya ialah audit internal. Audit internal berperan penting dalam membantu manajemen senior dan dewan direksi menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien. Auditor internal juga memiliki dampak besar dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dalam laporan keuangan sangat diperlukan agar alokasi dana pemerintah dapat diketahui dengan jelas. Auditor internal pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam kelangsungan pemerintahan di Indonesia. Kinerja yang baik dari auditor internal pemerintah akan membantu meningkatkan kualitas pemerintahan Indonesia. Sebaliknya, jika kinerja auditor internal menurun, hal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja pemerintahan.

Auditor internal pemerintah merupakan seorang auditor yang bekerja dibawah lembaga-lembaga atau instansi dibawah naungan pemerintah (Aurani & Ariani, 2022). Auditor wajib bertanggung jawab atas hasil audit dengan mematuhi standar audit dan berfokus pada kepentingan publik. Ini disebabkan oleh harapan masyarakat untuk mewujudkan praktik akuntansi yang sehat, kredibel, dan terpercaya. Keefektivitas auditor dituntut untuk memiliki keinginan yang tinggi dalam mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Seorang auditor dapat dianggap profesional jika kinerjanya mencerminkan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan mematuhi kode etik auditor (Julianti dkk., 2021).

Fungsi audit akan berjalan dengan efektif dan optimal jika didukung oleh perilaku auditor yang sesuai. Seorang profesional harus menunjukkan kinerja yang baik untuk memberikan dampak positif bagi organisasinya. Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh individu atau organisasi dalam menyelesaikan tugas berdasarkan pengalaman, keahlian, dan ketepatan waktu. Peningkatan kinerja auditor adalah pencapaian kualitas pemeriksaan yang efektif dan efisien (Sintyawati dkk., 2021). Kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal berupa dan dari eksternal (Rahmadanty & Farah, 2020). Faktor internal pada diri

seseorang seperti jenis kelamin, kesehatan, pengalaman, dan karakteristik psikologis yang terdiri dari motivasi, kepribadian, *locus of control*, dan komitmen organisasi. Faktor eksternal atau biasa dilihat dari situasinya seperti kepemimpinan, hubungan sosial, dan budaya organisasi yang dijalankan.

Motivasi merupakan bagian penting dalam diri dan perannya sangat dibutuhkan dalam mendorong seseorang untuk selalu meningkatkan kinerjanya (Lisda & Sukesih, 2020). Sehingga dengan adanya motivasi akan mendorong individu lebih berprestasi dalam setiap pekerjaannya. Motivasi dapat dimaknai sebagai alasan yang kuat dalam melaksanakan suatu tindakan. Motivasi bisa didapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, lingkup masyarakat, dan lain sebagainya.

Mulyadi (2017), independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh eksternal, tidak bergantung pada pihak lain, dan tidak mudah dikendalikan oleh pihak mana pun. Seorang auditor tidak hanya bekerja demi kepentingan klien, tetapi juga bertanggung jawab kepada pihak-pihak lain yang memiliki otoritas atas laporan tersebut saat menjalankan tugas audit terhadap laporan keuangan. Independensi seorang auditor memiliki arti bahwa auditor harus jujur dan sesuai fakta yang ada dalam memberikan opini auditnya. Auditor tidak memihak siapapun serta bebas dari pengaruh dan tekanan, sehingga laporan audit yang dihasilkan bersifat obyektif tanpa ada pengaruh subyektifitas dari pihak lainnya. Auditor harus memiliki sikap independensi yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah yang bertanggung jawab perlu bersikap independen terhadap kepentingan klien, pengguna laporan keuangan, atau kepentingan sektor publik, serta pelaporan yang telah diaudit (Monique & Nasution, 2020).

Auditor BPKP berperan sebagai auditor internal pemerintah dan berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan politik. Intervensi politik dapat muncul jika temuan audit berkaitan dengan isu politik. Peran auditor sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi, yang membawa harapan sekaligus risiko bagi auditor itu sendiri. Di satu sisi, diharapkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Public Governance*), sementara di sisi lain, auditor harus menghadapi

berbagai risiko, baik yang signifikan, seperti tekanan dari pihak auditee dan ancaman fisik serta psikologis, maupun risiko yang dianggap "tidak berbahaya," seperti pemberian uang dari auditee dengan alasan untuk biaya makan atau transportasi (Anggraini & Syofyan, 2020). Meskipun demikian, risiko-risiko ini, baik yang berbahaya maupun yang "tidak berbahaya," seharusnya tidak memengaruhi independensi auditor dalam pengambilan keputusan.

Cara pemimpin mengatur, mengarahkan, dan mengelola anggota staf atau bawahan menjadi faktor penting dalam menilai efektifitas dari tujuan organisasi sehingga dapat terpenuhi dengan baik. Kinerja manajemen dan anggota karyawan akan meningkat jika pemimpin dapat secara efektif mengelola dan membimbing bawahannya untuk melaksanakan tujuan organisasi secara benar dan teratur. Tidak dapat dihindarkan bahwa dukungan dari seorang pemimpin dapat memicu dan memberikan suasana bahagia dan optimis yang memotivasi bawahannya untuk bekerja lebih keras lagi. Faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja departemennya adalah jenis perilaku kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu metode atau sistem yang digunakan oleh seorang atasan untuk memengaruhi orang lain atau bawahannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi atasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, meskipun secara pribadi hal tersebut tidak memungkinkan (Rahmadanty & Farah, 2020).

Seorang auditor diharapkan dapat menunjukkan pendekatan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sikap profesional dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas dan mutu audit yang dilakukan. Kata "profesionalisme" berasal dari kata "profesi" dan mengacu pada kegiatan yang memerlukan pengetahuan khusus, yang mencakup pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan tersebut didasarkan pada pengetahuan tingkat tinggi dan pelatihan khusus (Timor & Hanum, 2023). Oleh karena itu, masyarakat dijamin bahwa mereka akan menerima jasa yang mereka inginkan dari seorang auditor. Auditor yang tidak mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) cenderung memiliki tingkat profesionalisme yang lebih rendah. Individu yang menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dapat memiliki kepercayaan diri dan ambisi

ketika menjalankan tugasnya. Hal ini memungkinkan proses kerja berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.

Penelitian tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor telah dilakukan beberapa kali di Indonesia. Penelitian Pangamiani (2023) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah menunjukkan hasil bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Motivasi dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas kinerja pegawai, serta mendorong mereka untuk memberikan hasil terbaik. Selain itu, hasil penelitian Agustina dan Sulardi (2018) di Inspektorat Kabupaten Klaten menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hotiana & Febriansyah (2018). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Bahri (2019) menemukan bahwa motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.

Penelitian sebelumnya mengenai independensi yang dilakukan oleh Marita & Gultom (2018) mendukung dengan menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja auditor. Hasil penelitian Prasetya (2019) dan Wahidi dkk., (2020) juga menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal. Sehingga hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat independensi auditor, maka kualitas kinerja mereka akan semakin tinggi. Namun demikian, hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aurani & Ariani (2022), independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor dan mengindikasikan semakin tinggi sikap independensi auditor tidak menghasilkan kinerja auditor yang lebih baik, atau sebaliknya.

Wahidi dkk., (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Penelitian tersebut menemukan bahwa gaya-kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian Handayani (2019) mengkonfirmasi hal tersebut, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor adalah positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kemampuan pemimpin senior dalam memengaruhi dan memengaruhi bawahannya menyebabkan bawahannya semakin

termotivasi dan lebih efisien dalam memenuhi tugas-tugasnya sehingga berkinerja baik. Namun, penelitian Monique & Nasution (2020) tidak menemukan adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja auditor. Artinya, gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor.

Penelitian sebelumnya mengenai profesionalisme dilakukan oleh Angela & Budiwitjaksono (2021) memiliki hasil bahwa terdapat pengaruh secara positif dari profesionalisme terhadap kinerja auditor. Penelitian Monique & Nasution (2020) dan penelitian Dariana & Refina (2020) juga mendukung bahwa profesionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Sikap auditor yang profesional akan dapat menentukan kualitas kerja auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dkk., (2022) menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Kurangnya empati dan sikap profesional oleh auditor BPKP RI mau pun Perwakilan terhadap motivasi, independensi, dan gaya kepemimpinan yang seharusnya dilakukan atau diberikan dalam memperkuat peningkatan kinerja seorang auditor dapat memengaruhi penggunaan auditor yang independensi oleh Negara atau Lembaga Pemerintah dalam mengaudit laporan keuangan menurun maupun dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap arahan yang diberikan oleh pihak atasan. Tentunya hal ini dapat memacu pengurangan penilaian kinerja auditor serta perlu adanya antisipasi tinggi agar hal buruk tidak terjadi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini ialah BPKP Perwakilan Provinsi Jambi sebagai unit analisis karena penelitian sebelumnya terkait kinerja auditor didominasi oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dan Inspektorat sebagai objek penelitiannya.
2. Perubahan variabel kompetensi menjadi variabel motivasi terhadap penelitian Pratiwi & Srimindarti (2021) mengenai “Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan

Publik Kota Semarang”. Alasan mengubah variabel motivasi adalah karena pada penelitian sebelumnya kompetensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, artinya tinggi atau rendah kinerja auditor tidak hanya dilihat dari kompetensi yang dimilikinya. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penilaian kinerja ialah motivasi (Aurani & Ariani, 2022). Auditor yang termotivasi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena mereka memiliki dorongan internal yang kuat untuk mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan.

3. Masih sedikit menggunakan variabel intervening pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini terdapat variabel profesionalisme sebagai variabel intervening.

Rendahnya kinerja auditor di Indonesia, meskipun telah menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik, menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan, dan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan tentunya memotivasi penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kinerja auditor melalui upaya pemberian motivasi, penguatan independensi, dan penerapan gaya kepemimpinan yang baik, dengan didukung oleh sikap profesionalisme di BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.

Berlandaskan uraian latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Motivasi, Independensi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Dengan Profesionalisme Sebagai Variabel Intervening di BPKP Perwakilan Provinsi Jambi”**. Variabel motivasi, independensi dan gaya kepemimpinan akan membawa gairah dan semangat kerja yang baik dengan harapan akan meningkatkan sikap profesionalisme dan kinerja auditor.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan yang dapat diangkat untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor?
5. Apakah motivasi berpengaruh terhadap profesionalisme auditor?
6. Apakah independensi berpengaruh terhadap profesionalisme auditor?
7. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap profesionalisme auditor?
8. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja auditor dengan profesionalisme auditor sebagai variabel intervening?
9. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor dengan profesionalisme auditor sebagai variabel intervening?
10. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor dengan profesionalisme auditor sebagai variabel intervening?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Guna memperoleh gambaran yang mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jambi yang berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja auditor.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel independensi terhadap kinerja auditor.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi terhadap profesionalisme auditor.

6. Untuk mengetahui pengaruh variabel independensi terhadap profesionalisme auditor.
7. Untuk mengetahui pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap profesionalisme auditor.
8. Untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja auditor dengan profesionalisme sebagai variabel intervening.
9. Untuk mengetahui pengaruh variabel independensi terhadap kinerja auditor dengan profesionalisme sebagai variabel intervening.
10. Untuk mengetahui pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor dengan profesionalisme sebagai variabel intervening.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis

1.1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memahami konsep teoritis dalam berperilaku auditor, memperluas basis pengetahuan di bidang audit manajemen, serta meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan akurat.

1.2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini, para akademisi diharapkan dapat mengidentifikasi pola perilaku seorang auditor, menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja auditor, dan mengembangkan variabel baru yang dapat menjelaskan perilaku auditor dalam menjalankan hingga menyelesaikan tugasnya dengan baik.

2. Manfaat Praktis

2.1. Bagi Auditor

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam pengembangan sikap profesionalisme, peningkatan motivasi, penerapan sikap independensi yang teguh, penerapan gaya kepemimpinan yang baik,

keterampilan komunikasi yang lebih efektif, dan mengelola risiko audit sehingga kinerja auditor mampu meningkatkan kualitas audit.

2.2. Bagi BPKP Perwakilan Provinsi Jambi

Adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran informasi yang berharga bagi BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas kinerja terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.